

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR
KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT**

SKRIPSI



OLEH:

FELISIANUS RIVALDO
NPM: 2163201047

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR
KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT**

SKRIPSI



OLEH:

FELISIANUS RIVALDO
NPM: 2163201047

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Nama Mahasiswa : Felisanus Rivaldo

NPM : 2103201047

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 15 Juni 2025

Menyetujui

Pembimbing I



Shorea Helminasari, S.I.P., M.A.
NIDN.1115098301

Pembimbing II



Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
NIDN.1121038503



Diketahui Dekan

Drs. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIK. 2023.070.326

Penguji:

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A.
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
3. Drs. H. Muhammad Zainal Arifin, M.Si

1.....

2.....

3.....

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Felisianus Rivaldo

NPM : 2163201047

Judul Skripsi:

Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat..

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Felisianus Rivaldo
NPM. 2163201047

RINGKASAN

Felisianus Rivaldo, Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, di bawah bimbingan Shorea Helminasari, S.I.P., M.A. dan Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Apakah Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Penelitian Dilakukan Terhadap Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dengan melalui Indikator-Indikator seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisien dan efektif, akuntabilitas dan bervisi strategis. Sedangkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kesederhanaan proses, kejelasan prosedur, kepastian waktu pelaksanaan, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Berdasarkan r_s hitung jika dibanding dengan r_s tabel pada tingkat signifikan alfa 0,5 r_s hitung lebih besar dibanding r_s tabel $0,735 > 0,235$. Dengan demikian maka hipotesis Alternatif yang telah peneliti kemukakan pada bab II di atas terbukti dan dapat diterima yaitu Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci : Penerapan *Good Governance*, Penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

RIWAYAT HIDUP



Felisianus Rivaldo, lahir di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Juni 2001 anak ke 1 dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yansyah dan Ibu Silvia Sitang. Pertama kali memulai Pendidikan di TK Doyo Pada Tahun 2005 dan lulus pada Tahun 2007 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar SDN 01 Jempang pada tahun 2007 selama 6 Tahun dan lulus pada Tahun 2013, pada Tahun 2013 peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Jempang selama 3 Tahun dan lulus pada Tahun 2016, setelah itu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Jempang selama 3 Tahun sehingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan ke jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 (satu) bulan pada bulan Agustus 2024 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak hal berkaitan dengan penelitian serta koreksi dan

saran-saran yang sangat bermanfaat dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

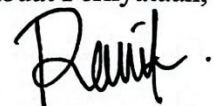
5. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan masukan-masukan serta saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama peneliti mengikuti perkuliahan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Tidak terlepas kepada seluruh staf Program Studi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, staf Akademik, staf Kemahasiswaan dan Tata Usaha serta staf Perpustakaan atas bantuan dan kemudahannya demi kelancaran penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Lorensius Itang, SE selaku Camat Kecamatan Jempang dan Bu Rita, S.Sos selaku Sekretaris Camat , dan Seluruh Pegawai dan Staf di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah tercinta dan panutanku yaitu bapak Yansyah, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang hanya tamatan SMA yang tidak pernah bermimpi bisa duduk di bangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi dan memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu ibu Silvia Sitang yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Terima kasih untuk do'a yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Terima kasih kepada saudara saya Maria Felisiana Rivalni, dan Febrianus Rivalino atas dukungan moril, materil serta doanya selama proses perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua pihak yang terkait. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan.

Samarinda, 15 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Felisianus Rivaldo
NPM.2163201047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang	20
B. Perumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian	26
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	29
A. Teori dan Konsep	29
1. <i>Good Governance</i>	30
2. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	38
3. Indikator <i>Good Governance</i>	42
4. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan.....	45
B. Hipotesis.....	46
C. Definisi Konseptual	47
D. Definisi Operasional	49
E. Jenis Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jadwal Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	54
C. Gejala Yang Dihadapi.....	57
D. Alat Pengukur Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data	62

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Sejarah Singkat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat	66
C. Visi dan Misi	71
D. Penyajian Data	72
1. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	73
2. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025	56
Tabel 4.1 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan”.....	75
Tabel 4.2 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka”.....	76
Tabel 4.3 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”..	77
Tabel 4.4 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.....	78
Tabel 4.5 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil”.....	79
Tabel 4.6 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi”.....	80
Tabel 4.7 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.”.....	81
Tabel 4.8 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat”.....	82
Tabel 4.9 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat”.....	83
Tabel 4.10 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.”.....	84
Tabel 4.11 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat”..	85
Tabel 4.12 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat”.....	86

Tabel 4.13 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak”	87
Tabel 4.14 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik”	88
Tabel 4.15 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan”	89
Tabel 4.16 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang”	90
Tabel 4.17 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial”	91
Tabel 4.18 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan public”	92
Tabel 4.19 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan Masyarakat”	93
Tabel 4.20 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik”	94
Tabel 4.21 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan”	95
Tabel 4.22 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”	96
Tabel 4. 23 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat” ..	97
Tabel 4.24 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat”	98
Tabel 4.25 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan public”	99

Tabel 4.26 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah”	100
Tabel 4.27 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “ Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”	101
Tabel 4.28 Rangkuman total nilai jawaban responden untuk independent variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X)	102
Tabel 4.29 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami”	105
Tabel 4.30 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan”	106
Tabel 4.31 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”	107
Tabel 4.32 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat”	108
Tabel 4.33 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”	109
Tabel 4.34 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas”	110
Tabel 4.35 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan”	111
Tabel 4.36 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan dengan jelas”	112
Tabel 4.37 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan”	113
Tabel 4.38 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah”	114
Tabel 4.39 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung”	115

Tabel 4.40 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik”.	116
Tabel 4.41 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan”.	117
Tabel 4.42 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.	118
Tabel 4.43 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku”.	119
Tabel 4.44 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung”.	120
Tabel 4.45 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai masyarakat”.	121
Tabel 4.46 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan”.	122
Tabel 4.47 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat”.	123
Tabel 4.48 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik”.	124
Tabel 4.49 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang bersahabat”.	125
Tabel 4.50 Rangkuman total nilai jawaban responden untuk dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y)	127
Tabel 4. 51 Urutan skor dan Ranking himpunan yang sama hberdasarkan nilai terkecil sampai nilai terbesar untuk Independen variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) dan Dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y).	130
Tabel 4. 52 Skor dan Ranking hasil berdasarkan distribusi skor untuk Independen variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) dan Dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y).	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Panduan Wawancara (Kuisisioner).....	149
Lampiran 2.1 Dokumentasi Penelitian.....	155
Lampiran 2.2 Dokumentasi Wawancara dengan Camat Jempang	155
Lampiran 2.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Sekretaris Kecamatan Jempang	155
Lampiran 3.1 Surat Balasan Penelitian	159
Lampiran 4.1 Tabel Harga Kritis Korelasi Rank Spearman	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan administrasi publik di Indonesia. Konsep *Good Governance* menjadi kerangka acuan global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep tata pemerintahan yang baik berawal dari tidak efisiensinya kinerja pemerintahan yang mengandalkan administrasi publik. Tata pemerintahan yang baik merupakan cita-cita seluruh warga negara yang terlibat dalam pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas tinggi menjamin kehidupan yang tertib bagi warganya dan mewujudkan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam upaya mencapai otonomi daerah, khususnya di Indonesia, pemerintahan daerah atau daerah yang efektif, efisien, mandiri dan bebas dari korupsi. Hal ini juga didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang akan memberikan peluang lebih besar bagi penerapan prinsip desentralisasi,

dekosentrasi, dan penunjang operasional. Prinsip otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah (*public services*) secara optimal, dan tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat (*centralistic*).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Pasal 1 ayat 1 tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik”. Pada prinsipnya pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah yang menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, tidak hanya berpusat pada instansi induk atau dinas. Namun menyentuh hingga unit terkecil pemerintahan yaitu kecamatan. Sebagai organisasi sektor publik instansi pemerintahan dituntut agar memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada pemerintahan tersebut.

Di Indonesia, penerapan *Good Governance* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua Undang-undang ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik di Tingkat pusat maupun daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan memiliki tugas utama melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Tugas ini mencakup berbagai aspek, seperti koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan juga menjalankan fungsi administratif seperti perencanaan strategis, pengawasan kinerja pegawai, serta pelaporan program dan kegiatan.

Kecamatan Jempang sebagai salah satu mitra pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi sekaligus berperan penting dalam implementasi

prinsip-prinsip tersebut. Diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, pelayanan publik di Kecamatan Jempang dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Selain itu, penerapan ini juga dapat meningkatkan Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dan memperbaiki citra daerah di mata publik.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip *Good Governance* di kantor kecamatan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi aparat pemerintah dan masalah infrastruktur sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di kecamatan Jempang agar dapat mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan, serta mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan solusi yang perlu diambil untuk memperbaikinya.

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di kantor kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat maka peneliti merumuskan asumsi sebagai berikut yaitu,

1. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti tertarik menetapkan judul sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

B. Perumusan Masalah

Sebelum peneliti merumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan beberapa pendapat yang peneliti peroleh dari literatur.

Menurut A. Michael Huberman (2016:138) menjelaskan secara singkat tentang hal ini, “Mereka menyebutkan bahwa ada dua kegunaan rumusan masalah. Pertama rumusan masalah adalah cara untuk membuat asumsi-asumsi teoritis menjadi lebih tegas di bandingkan dengan apa yang ada pada kerangka konseptual. Kedua menjelaskan kepada kita mengenai sesuatu yang paling utama dan yang pertama ingin kita ketahui”.

Sedangkan Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2019:60) Perumusan masalah merupakan “ Perumusan masalah ke dalam bentuk yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisahkan dengan paparan yang terdapat

pada latar belakang masalah”. Selanjutnya menurut pendapat Sugiyono (2019:63) “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data”.

Dari penjelasan diatas menurut para ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa rumusan masalah merupakan suatu permasalahan yang didapat dari antara variable yang akan diteliti yang nantinya akan didapatkan hasilnya melalui penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “apakah prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat”.

C. Tujuan Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, diperlukan tujuan agar peneliti dapat memfokuskan suatu penelitian yang ingin diketahui agar lebih terarah dan terukur, maka dari itu peneliti memaparkan terlebih dahulu beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut.

Menurut Ulber Silalahi (2012:9) “ Pada hakekatnya penelitian bertujuan untuk memberi solusi atas suatu masalah dan mendapat pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap benar melalui proses observasi”.

Menurut Sugiyono (2015:397) menyatakan “Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan .

Sedangkan menurut Endang Winarni (2018:14) “ Tujuan penelitian adalah menemukan kebenaran dengan mengumpulkan fakta atau menjelaskan realitas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam lingkungannya”.

Maka maksud tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebelum itu berikut pemaparan mengenai pendapat para ahli.

Menurut Rachmad Trijono (2015:15) “ Manfaat penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”.

Sedangkan menurut Indrawati (2018:92) mengatakan “ Manfaat atau kepentingan akademik berisi paparan atau penjelasan akan manfaat yang akan diperoleh dari dilakukannya penelitian, sering juga peneliti menuliskan manfaat penelitian, karena bagian ini menjelaskan apa kepentingan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian harus dilakukan”.

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2021:401) “ Manfaat penelitian dirumuskan secara singkat dan dengan Bahasa yang tepat. Kegunaan penelitian baik dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan Masyarakat pada umumnya”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa manfaat penelitian adalah hasil dari fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan melalui penelitian yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perpustakaan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Tingkat Kecamatan dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan di Kecamatan Jempang.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan peran mereka dalam proses pemerintahan yang baik dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah kecamatan.
- d. Bagi Aparatur Pemerintah, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori dan Konsep

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus memiliki dasar-dasar penulisan yang berupa teori-teori, karena teori merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Teori dan konsep merupakan dua unsur yang memecahkan suatu masalah atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah dalam penelitian ini.

Menurut Deddy Mulyadi (2015:1) "Konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya". Selanjutnya menurut Hoy dan Miskel dalam Sugiyono, (2017:54) "Konsep adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi".

Selanjutnya menurut Dyah Ratih Sulistyastuti (2017:16) "Teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan yang sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu". Kemudian menurut Kerlinger dalam Sugiyono, (2017:103) "Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena".

Kemudian Menurut M. Astri Yulidar Abbas (2019:37) "Teori merupakan alat terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa adanya teori, maka yang ada

adalah pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan”.

Berdasarkan paparan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu tulisan yang didalamnya menjelaskan definisi atau konsep suatu hal yang berdasarkan suatu fakta dan hukum. Sedangkan konsep merupakan suatu ciri, rangkaian, atau Gambaran yang akan dituangkan dalam suatu penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik.

1. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Good Governance adalah konsep yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk mencapai keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bank Dunia, Good Governance mencakup manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, serta mencegah korupsi baik secara politis maupun administrative. Secara umum, Good Governance dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mengedepankan keinginan rakyat dan memperkuat kapasitas mereka dalam mencapai keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan. Ini meliputi aspek fungsional dari pemerintahan yang mampu beroperasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Sahya Anggara (2012:202) “Pengertian pemerintahan (*governance*) adalah suatu kegiatan (proses), bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan Masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan”.

Kemudian Riswanda Imawan (2012:32) “*Good Governance* diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial pembangunan Masyarakat”.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2012:3) ”Secara konseptual pengertian kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman, yang pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dengan rakyat dan pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, Pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial”.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2017:7), ” *OECD (Organization for Economic Co – Operation and Development)* dan *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen Pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”.

Selanjutnya Menurut Hayat (2017:167) “*Good Governance* adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik”.

Berdasarkan paparan dari para ahli sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan, *governance* merupakan suatu serangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya tidak hanya aktor pemerintah saja yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik tetapi Masyarakat juga ikut berpartisipasi.

b. Landasan Hukum *Good Governance*

Peraturan perundangan yang menjadi landasan implementasi *Good Governance* adalah:

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan salah satu mata diklat yaitu; Dasar-dasar Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).
2. Pasal 20 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengatur asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik.
3. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. UUNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. UUNo.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri No.Kep-/M-MBU/2002 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance.

Undang-undang diatas mengatur tentang pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

c. Prinsip – prinsip *Good Governance*

Prinsip dasar "*Good Governance*" atau "pemerintahan yang baik" mengacu pada cara suatu negara atau organisasi dikelola dengan efektif dan efisien sambil mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Tata kelola mengandung makna bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata berada di tangan pemerintah, dan bukan pula menjadi urusan pemerintah, melainkan pelaksanaan fungsi tata kelola dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan lembaga lain, yaitu organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan swasta dan publik. *United Nation Development Program* (UNDP) sendiri dalam Suhady, (2005:50) mendefinisikan *Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antaranegara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik *Good Governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat

tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis.

Lebih lanjut, *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *Good Governance* yaitu:

- a) Negara atau Pemerintah
- b) Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan sipil (*civil society*).

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *Good Governance*.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2012:13) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan dan dilaksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dari informasi harus disediakan secara memadai dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan agar bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Adapun menurut UNDP (Hanafi & Tunggadewi, 2019) menyatakan bahwa terdapat sembilan prinsip untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap Petugas Pemberi Layanan, Berorientasi, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi Strategis. Berikut ini uraian lengkap dari sembilan prinsip tersebut:

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, Partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat,

laki-laki dan perempuan wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Penegakkan Hukum

Dalam rumusan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Program pada tahun 1997, penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayanan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Transparansi

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya.

4. Daya Tanggap

Petugas Pemberi Layanan Salah satu prinsip *Good Governance* yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Dalam rumusan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Program tahun 1997, daya tanggap memiliki arti

yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).

5. Berorientasi

Pada Konsensus Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh United Nations Development Programmers (UNDP) pada tahun 1997.

6. Berkeadilan

Prinsip *Good Governance* berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda bedakan. Menurut badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya dalam pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membeda - bedakan suku, ras, agama, serta sosial, maupun jenis kelamin.

7. Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan

Efektifitas dan Efisiensi merupakan salah satu dari prinsip *Good Governance* yang harus diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Menurut United Nation Development Program pada tahun 1997, efektifitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar benar dibutuhkan.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip *Good Governance* yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, akuntabilitas memiliki pengertian yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggung jawaban kepada publik.

9. Bervisi Strategis

Menurut United Nations Development Program (UNDP), badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, prinsip terakhir dari *Good Governance* adalah bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Definisi Penyelenggaraan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan diartikan sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara." Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.

Landasan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia terdiri dari: landasan ideal (Pancasila), dan landasan konstitusional (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan landasan operasional tidak dikenal lagi sejak GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dihapuskan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, kemudian dasar operasional ini diacu pada UU Propenas. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia ialah dalam rangka membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dimampatkan sebagai tujuan nasional dan internasional.

Asas-asas pemerintahan Indonesia dapat dirujuk pada: asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

AAUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP):

1. kepastian hukum
2. kemanfaatan
3. ketidakberpihakan
4. kecermatan
5. tidak menyalahgunakan kewenangan
6. keterbukaan

7. kepentingan umum
8. pelayanan yang baik

Adapun asas dalam Pemerintahan di Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu sebagai berikut :

a) Asas Keahlian

Merupakan asas penyelenggaraan/ pelaksanaan fungsi keahlian menurut sektoral/ bidangnya. Asas ini diterapkan pada struktur lembaga lembaga negara serta susunan pemerintah pusat yang terdiri atas lembaga-lembaga departemen dan non departemen. Melalui asas ini dipahami bahwa susunan pemerintahan baik di pusat maupun di daerahnya diambil dari orang yang ahli di bidangnya masing-masing.

b) Asas Kedaerahan

Luas dan berkembangnya kepentingan pemerintah pusat dalam mengetahui rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka muncul asas-asas:

1) Dekonsentrasi

Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2) Desentralisasi

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

3) Tugas Pembantuan

adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 30 sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Melalui pengertian dan landasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

b. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial. Fungsi utama dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, menyediakan layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga ketertiban umum

dan menciptakan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan dasar, tetapi juga mencakup penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara efektif, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

3. Indikator *Good Governance*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menekankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Indikator penyelenggaraan pemerintahan merupakan alat ukur yang penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks *Good Governance*, indikator-indikator ini membantu untuk

mengevaluasi seberapa baik prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam praktik.

Menurut Mardiasmo (2018) yang dikutip oleh United National Development Program (UNDP) terdapat indikator *good government governance*, sebagai berikut: *Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic Vision*. Maka penjelasan dari indikator *good government governance* diatas sebagai berikut:

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule Of Law*. Kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang dia siapa dan jabatannya apa.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam hal menyampaikan pelayanan stakeholder.
- e. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan Masyarakat yang lebih luas.

- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan.
- i. *Strategic Vision*. Panduan untuk mengambil Keputusan dan perencanaan strategis, serta memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi.

Kemudian *Good Government Governance* (dalam Mahsun, 2018 : 48), yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Partisipasi (*Participation*). Berikut penjelasan dari indikator *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipasi (*Participation*) adalah Keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Dari beberapa pendapat diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung *Good Government Governance* (Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik) pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah.

4. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Edelman (2010:22), mengatakan “melihat kualitas pelayanan itu dari berbagai segi, yakni dari segi penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan masyarakat atau konsumen).

- a. Kesederhanaan Proses, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan Prosedur ,yang mencakup Rincian biaya atau tarif pelayanan public dan Prosedur atau tata cara umum, baik teknis maupun administratif.
- c. Kepastian waktu Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- e. Kedisiplinan, yaitu pelayanan harus bersikap disiplin.

- f. Kesopanan, yaitu pelayanan harus bersikap sopan dan santun.
- g. Keramahan, yaitu memberikan pelayanan serta ramah

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat kualitas pelayanan dari segi penyelenggaraan pemerintahan kesederhanaan dalam tata cara pelayanan, prosedur yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan.

B. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya sementara dari suatu penelitian yang masih memerlukan pembuktian tentang kebenaran yang dihadapi sehingga menimbulkan suatu kenyataan yang rasional dan dapat diterima serta dimengerti oleh setiap orang secara logika.

Menurut Ulber Silalahi (2012:160) “ Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris”.

Sedangkan Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Menurut Nanang Martono (2015:106) mengemukakan bahwa “ Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenerannya masih harus diuji; rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan Pustaka. Hipotesis

juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”.

Adapun Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2019:76), Mengemukakan bahwa “ Hipotesis merupakan sisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis merupakan praduga yang sifatnya sementara atau belum pasti yang masi memerlukan suatu pembuktian dengan melakukan penelitian, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha :”Diduga berpengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat”.

Ho :”Diduga tidak berpengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat”.

C. Definisi Konseptional

Definisi konseptional adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Menurut Rianto Adi (2011:29) yaitu, “Definisi Konseptional adalah kerangka berfikir kita yang bersifat teoritis atau konseptional mengenai masalah yang kita teliti”.

Adapun Menurut A.M Heru Basuki (2011:23) “ Konseptional adalah yang menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus yang akan diteliti.

Konsepsional juga digunakan untuk mendefinisikan pengertian di dalam penelitian agar tidak mengalami pembiasaan dalam pengumpulan data hingga pada tahap analisis penelitian”.

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2012:118) yaitu “ Definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain, atau mendefinisikan suatu konstruk-konstruk lain”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa definisi konsepsional adalah menggambarkan adanya Batasan mengenai suatu konsep variabel yang diteliti yang didalamnya terkandung definisi dari konsep yang akan diteliti. Maka dengan penelitian ini, konsep dari kedua variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah serta memenuhi kebutuhan Masyarakat secara adil dan berkelanjutan, ditinjau dari sisi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, daya tanggap, berorientasi pada masyarakat, kesetaraan, efisien dan efektif, serta bervisi strategis.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas eksekutif atau administrasi negara dalam memberikan pelayanan public secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditinjau dari kesederhanaan proses, kejelasan prosedur, kepastian waktu pelayanan, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.

D. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan Batasan sekaligus mempertegas ruang lingkup serta obyek yang diteliti, maka perlu menetapkan indicator-indikator tersebut, lebih dahulu peneliti kemukakan beberapa pengertian atau definisi operasional menurut para ahli.

Menurut Sugiyono (2012:31), “Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik”.

Sedangkan Menurut Sanjaya (2013:287) mengatakan bahwa definisi operasional adalah “Definisi yang dirumuskan oleh peneliti mengenai istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang terkait dengan penelitian”.

Kemudian menurut Nanang Martono (2015:67) mengatakan “Secara sederhana definisi operasional dimaknai sebagai petunjuk yang menjelaskan kepada peneliti mengenai bagaimana mengukur sebuah variabel secara konkret. Melalui definisi operasional, peneliti akan lebih mudah menentukan metode untuk mengukur sebuah variabel serta menentukan indikator”.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa definisi operasional merupakan batasan dari variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dari beberapa teori diatas maka peneliti menetapkan beberapa indicator dari independent variabel dan dependent variabel yang ingin diteliti dan dicari hubungannya dan ditarik kesimpulannya.

Independen variabel (Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*) diberi lambang (X) sedangkan Dependen variabel (Penyelenggaraan Pemerintahan) diberi lambang (Y) dengan Indikator sebagai berikut :

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Variabel (X) Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Participation</i> 2. <i>Rule Of Law</i> 3. <i>Transparency</i> 4. <i>Responsivness</i> 5. <i>Consensus Orientation</i> 6. <i>Equity</i> 7. <i>Effeciency and Effectiveness</i> 8. <i>Accountability</i> 9. <i>Strategic Vision</i> 	Mardiasmo (2018)
2	Variabel (Y) Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesederhanaan proses 2. Kejelasan prosedur 3. Kepastian waktu pelaksanaan 4. Kemudahan akses 	Edelman (2010:22)

No	Variabel	Indikator	Sumber
		5. Kedisiplinan 6. Kesopanan 7. Keramahan	

E. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti lakukan bersifat kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, Dimana variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya dan dalam penelitian ini variabel independent adalah Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* sedangkan variabel dependen adalah Penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sugiyono (2007: 14-15), “Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (*scoring*) yaitu kalimat yang diangkakan. Data kuantitatif adalah data yang dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu data diskrit dan kontinum. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang (bukan mengukur). Sedangkan sebaliknya data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran (Angket dan *Kuisisioner*)’.

Adapun Menurut Creswell yang dikutip Rachmat Trijono (2015:17), “Penelitian kuantitatif yakni penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas variabel-variabel, diukur dengan bilangan-bilangan dan dianalisis dengan prosedur-prosedur statistic”.

Berdasarkan dari pendapat ahli diatas, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang mengolah data berdasarkan kontinum yaitu mengolah data dari hasil pengukuran kuisisioner yang diberi nilai (*scoring*). Menurut Sugiyono,(2004:38) “Sedangkan bentuk hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi dalam penelitian terdapat dua variabel indpenden (variabel mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi)”.

Dengan pengertian variabel x mempunyai peluang untuk mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel y, dan untuk menguji kebenarannya harus melalui pengujian hipotesa, apakah dapat diterima atau ditolak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian

Sebelum membahas hasil penelitian, peneliti akan menguraikan secara singkat tahapan penelitian mulai dari awal kegiatan, hingga akhir pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian 2024-2025								
		Okt	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Observasi dan Studi Kepustakaan	■								
2	Pengajuan Judul		■							
3	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	
4	Penelitian Lapangan						■	■		
5	Seminar								■	
6	Pendadaran									■

Sumber : Dibuat oleh Peneliti

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam tahap penelitian ini bertujuan untuk mengambil data sebagian dari populasi yaitu sampel, sampel digunakan untuk mewakili populasi yang akan diteliti, dibawah ini beberapa teori tentang populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan unsur yang disajikan sebagai obyek penelitian. Menurut Ulber Silalahi (2012:253), “ Populasi adalah seluruh unit-unit yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua”.

Menurut Rachmad Trijono (2015:30-31) “ Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistic baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, benda maupun objek lainnya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2015:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Kemudian Menurut Hartono (2019:163) “Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian”. Sedangkan Menurut Sugiyono (2016:80), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan populasi adalah yang benar-benar dijadikan sumber data dan keseluruhan objek yang digunakan menjadi suatu objek penelitian.

2. Sampel

Menurut Ulber Silalahi (2012:254) “ Sampel adalah suatu subset atau tiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representative atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi”.

Sedangkan menurut Nanang Martono (2015:268) “ Sampel merupakan bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representative atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi”.

Adapun menurut Sugiyono (2015:149) “Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau yang mewakili dari populasi yang dipilih

menggunakan prosedur yang telah ditentukan peneliti untuk menghemat waktu, dana dan tenaga.

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025

No	Status	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kepala Substansi	3
4	Kepala Subbagian	2
5	Bendahara	2
6	Staf Subbagian	9
7	Staff	22
8	Masyarakat	10
Jumlah		50

Sumber: Data Pegawai Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 2025

Menurut Sugiyono (2013:218) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti

Dari uraian diatas bahwa jumlah pegawai yang berada di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat yaitu sebanyak 40 orang dan masyarakat 10 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan demikian peneliti tidak mengambil sampel sehingga populasi sebanyak 50 yang secara keseluruhan dijadikan sebagai responden, atau disebut juga Teknik purposive sampling.

C. Gejala Yang Dihadapi

Secara umum sebuah penelitian akan menghadapi gejala yaitu gejala nominal dan gejala kontinum, dimana gejala ini memiliki ciri-ciri yang berbeda baik perbedaan prosedur maupun penggunaan alat untuk menghadapinya.

Menurut Sutrisno Hadi (2004:90), mengatakan "Gejala nominal dan gejala kontinum sebagai berikut : Gejala nominal adalah suatu gejala yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit, secara kategorik, sedangkan gejala kontinum adalah gejala yang bervariasi menurut tingkatnya. Gejala ini memiliki kontinuitas dan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk menggolongkan subyek pendukung gejala".

Adapun menurut Ulber Silalahi (2012:283-284) "Data kuantitatif dibedakan atas dua yaitu data distrik dan data kontinum. Data distrik adalah data dari hasil pengukuran variabel distrik, yaitu variabel yang mempunyai nilai utuh atau nilai yang tetap dan pasti dan tidak memiliki nilai pecahan. Sedangkan data kontinum atau data bersambung yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kontinum, yaitu variabel yang memiliki nilai yang dinyatakan dengan nilai tidak terbatas dari minimum dan maksimum sehingga dapat berupa angka pecahan".

Kemudian menurut Sugiyono (2019:12) mengatakan bahwa “ data kuantitatif dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontium. Data diskrit sering juga disebut data nominal adalah merupakan data kuantitatif, dimana data sama lain, tidak dalam satu garis kontium. Data ini diperoleh dari hasil mengitung”. Sedangkan, “Data kontium adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Data ini di peroleh dari hasil kemampuan, motivasi, dan IQ. Data kontoum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan ratio”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penelitian ini hanya mengukur gejala kontinuitas, sebab gejala ini memiliki kontinuitas ciri yang dapat digunakan untuk menggolongkan subjek-subjek pendukung. Sampel penelitian dapat diambil dari jumlah populasi yang digunakan untuk mengukur penelitian.

D. Alat Pengukur Data

Sesuai dengan gejala yang dihadapi dalam penulisan proposal ini adalah gejala kontinum, maka untuk mengukur data penulis menggunakan skala ordinal. Skala ordinal diurut dalam urutan tingkatan (*rank order*) dalam hubungan dengan jumlah atribut yang dimiliki.

Menurut Sutrisno Hadi (2004:124), yaitu “Skala ordinal menunjukkan angka posisi dari suatu urutan. Skala ordinal disebut pula sebagai skala berjenjang, sebab menggolongkan subyeknya menurut jenjang tanpa memperhatikan jarak antara golongan yang satu dengan yang lain”.

Adapun menurut Ulber Silalahi (2012:219-219-220) ”Skala ordinal dapat diurut dalam urutan tingkatan (*rank order*) dalam hubungan dengan jumlah atribut yang dimiliki. Ukuran ordinal mengindikasikan satu perbedaan juga ditambah kategori dapat diurut (contoh, ukuran pendapat: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)”.

Dalam menggunakan skala ordinal dilakukan dengan metode likert, dimana indeks-indeksnya diberi skor, maka peneliti merubah data atau angka-angka kuantitatif. Butir-butir alat pengukuran data yang digunakan juga bervariasi antara 1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4, dan 1 sampai 5. Kemudian penggunaan jenjang atau skor untuk indeks yang menunjukkan fungsi rendahnya setiap gejala.

Menurut Saifuddin Azwar (2001:77) menyatakan, ”Biasanya seorang peneliti menginginkan range yang cukup besar sehingga informasi yang dikumpulkan lebih lengkap adapun peneliti dapat menggunakan jenjang 3 (1,2,3) jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7)”.

Menurut Sugiyono (2019:146) “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”.

Kuisisioner disusun dengan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban yang disusun mulai dari jawaban responden tertinggi hingga jawaban responden terendah, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut :

1. Apabila responden memilih jawaban (a) “Sangat Setuju” maka diberi skor 5
2. Apabila responden memilih jawaban (b) “Setuju” maka diberi skor 4
3. Apabila responden memilih jawaban (c) “Ragu-ragu” maka diberi skor 3
4. Apabila responden memilih jawaban (d) “Tidak Setuju” maka diberi skor 2
5. Apabila responden memilih jawaban (e) “Sangat Tidak Setuju” maka diberi skor 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu pembuktian hipotesis dalam suatu kajian ilmiah agar terbukti kebenarannya, oleh karena itu kualitas data yang didapat sangat mempengaruhi hasil penelitian.

Menurut Ulber Silalahi (2009:280), “Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapat data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu”.

Adapun menurut Harbani Pasolong (2016:130) mengatakan, “Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu peneliti. Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka ujian hipotesis”.

Kemudian Menurut Sugiyono (2019:228) “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya”.

Berikut adalah beberapa unsur yang akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yaitu sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu studi literatur merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara:
 - a) Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung/pengamatan langsung ke objek penelitian pada Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.
 - b) Interview, yaitu wawancara dengan langsung melakukan tanya jawab dan tata muka dengan petugas kantor Kantor Kecamatan

Jempang Kabupaten Kutai Barat, untuk melengkapi hasil kuisisioner untuk pengumpulan data.

- c) Kuisisioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibagikan kepada pengunjung atau responden untuk dijawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- d) Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara meneliti dan mempelajari literatur-literatur karya ilmiah, dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk menghimpun data-data yang diperoleh dan untuk mengelompokkan data sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, serta agar mudah dalam penyajian data.

Menurut Ulber Silalahi (2009:131-132) “Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam satu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi”.

Kemudian menurut Nanang Martono (2015:10) “Analisis data merupakan pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita”.

Adapun menurut Sugiyono (2019:241) berpendapat “Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh perhitungan untuk menjawab rumusan dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Karena peneliti menggunakan alat ukur data secara ordinal maka analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan Teknik analisis data koefisien korelasi spearman atau korelasi *rank older*. Dimana Teknik tersebut digunakan untuk mengukur korelasi antar dua variabel yang memiliki tingkat pengukuran ordinal, yaitu rumus untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel.

Pengaruh penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Analisis data yang digunakan adalah ukuran korelasi statistic non parametrik yaitu koefisien rank spearman (Rs) analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel yaitu Prinsip-prinsip *Good Governance* (Independen Variabel) dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dependen Variabel).

Adapun rumus berdasarkan Sidney Siegel, (2011:255-256) yaitu :

1. Apabila tidak ditemukan himpunan yang berangka sama maka dipergunakan rumus sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

Keterangan :

r_s = Koefisien korelasi rank spearman

N = Banyaknya ukuran sampel

d_i^2 = Jumlah keseluruhan d_i^2 yang merupakan harga masing-masing objek diperoleh dari selisih antara ranking x dan y

2. Apabila ditemukan himpunan yang berangka sama maka dipergunakan rumus berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

dimana :

$$\sum x^2 = \frac{N^2 - N}{12} - \sum Tx$$

$$\sum y^2 = \frac{N^2 - N}{12} - \sum Ty$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

r_s = Koefisien korelasi rank spearman

N = Banyaknya ukuran sampel

$\sum x^2$ = Jumlah ranking yang sama pada variabel x

$\sum y^2$ = Jumlah ranking yang sama pada variabel y

$\sum d_i^2$ = Jumlah hasil pengurangan antara ranking yang terdapat pada variabel x dan y melalui pengkuadratan

T = Faktor korelasi

12 = Bilangan tetap

T = Banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu pada N kasus tingkat signifikan alfa 0,05 apabila r_s empiris lebih besar atau sama dengan table korelasi rank spearman maka terdapat pengaruh independent variabel dengan dependen variabel. Sebaliknya jika r_s empiris lebih kecil dengan table korelasi rank spearman maka tidak terdapat pengaruh independent variabel dengan dependen variabel.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis, wilayah Pemeritahan Kecamatan Jempang secara astronomis pada $115^{\circ}58'00''$ – $116^{\circ}17'00''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}23'$ – $0^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Kecamatan Jempang merupakan salah satu dari 16 (Enam Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah adalah $654,40 \text{ km}^2$ dan dengan jumlah Penduduk 12.886 yang diantaranya terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.772 dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 6.114 dengan total Kepala Keluarga sebanyak 3.225 Kepala Keluarga, yang tersebar di 12 (Dua Belas) Kampung yang terdapat di Kecamatan Jempang tahun 2024 dengan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bongan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bongan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Pahu dan Kecamatan Siluq Ngurai.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

Kecamatan Jempang, salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya, kekayaan alam, dan dinamika sosial-politik. Pembentukan

Kecamatan Jempang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemekaran Kabupaten Kutai Barat. Sebelum 1999, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Kutai yang luas. Melalui UU No. 47/1999, Kutai Barat resmi menjadi kabupaten otonom, dengan Jempang sebagai salah satu kecamatan pertamanya. Proses ini didorong oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya lokal.

Struktur administratif Kecamatan Jempang mencakup 12 (dua belas) kampung, antara lain :

1. Kampung Tanjung Isuy
2. Kampung Lembonah
3. Kampung Bekokong
4. Kampung Mancong
5. Kampung Muara Nayan
6. Kampung Muara Ohong
7. Kampung Muara Tae
8. Kampung Pentat
9. Kampung Perigiq
10. Kampung Pulau Lanting
11. Kampung Tanjung Jan
12. Kampung Tanjung Jone.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017, Kantor Kecamatan Jempang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas pokok Camat sebagai pimpinan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan desa dan implementasi kebijakan daerah.
2. Penguatan ketentraman umum melalui penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial.
3. Pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor unggulan seperti kerajinan Tenun Ikat Ulap Doyo, melalui pelatihan dan pendampingan bisnis.

Fungsi Kantor Kecamatan meliputi :

1. Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan dasar seperti administrasi kependudukan.
2. Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pada peningkatan kapasitas perajin tenun melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta perluasan pasar produk ulap doyo.
3. Pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk koordinasi perbaikan jalan dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Jempang mengikuti pola umum perangkat daerah kabupaten, dengan komponen utama sebagai berikut :

a. Pimpinan

1). Camat

Camat merupakan pimpinan kecamatan yang diangkat oleh bupati/walikota dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta seluruh kebijakan dan koordinasi antar-seksi. Di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Camat juga aktif dalam program pemberdayaan, seperti pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk pengrajin tenun.

2). Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang bertugas menyelenggarakan urusan keuangan, umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Bidang Pemerintahan

1). Seksi Pemerintahan

Menangani administrasi desa, termasuk verifikasi data kependudukan dan pendampingan kepala desa.

2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mengawasi penegakan peraturan daerah, seperti pengendalian aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mengawasi penegakan peraturan daerah, seperti pengendalian aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

2). Seksi Kesejahteraan Sosial

Fokus pada program bantuan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, termasuk pelatihan keterampilan bagi pengrajin tenun.

4. Sumber Daya Manusia

Kantor Kecamatan Jempang didukung oleh staf berpendidikan minimal SMA hingga sarjana, dengan kompetensi di bidang administrasi publik dan pengembangan masyarakat. Pelatihan rutin seperti Diklat Peningkatan Kapasitas Usaha diberikan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam mengelola program pemberdayaan. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan jumlah pegawai yang harus melayani wilayah seluas 1.237 km² dengan populasi tersebar.

C. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Jempang sebagai bagian integral dari Kabupaten Kutai Barat adalah “Menjadi kecamatan yang mandiri melalui penguatan ekonomi berbasis budaya lokal dan tata kelola pemerintahan yang transparan”.

Misi adalah fondasi yang mendasari arah dan aktivitas organisasi agar tetap konsisten dan terarah dalam mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan visi yang diuraikan diatas dan definisi misi, maka dapat dirumuskan misi Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kedisiplinan, Kualitas, Kuantitas dan Produktivitas Kinerja.
2. Mengoptimalkan potensi lokal dengan menjadikan Tenun Ikat Ulap Doyo sebagai produk unggulan nasional melalui inovasi desain dan perluasan jaringan pemasaran
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi dan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah terisolasi.
4. Meningkatkan motivasi dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

D. Penyajian Data

Setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh antara dua variabel, adapun indikator dari dua variabel penelitian ini, dimana prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai independen variabel dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai dependen variabel, yang mana variabel independen terdiri dari 9 indikator dan dependen variabel terdiri dari 7 indikator.

Dalam penelitian ini pengambilan populasi dan sampel peneliti menggunakan Teknik purposive sampling yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat serta masyarakat yang hadir dalam pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang.

Untuk mendapatkan data pengukuran dua variabel yang diteliti, maka setiap indikator peneliti membuat 3 pernyataan dengan 5 (lima) pilihan jawaban masing-masing karena terdapat 16 indikator dari 2 variabel. Jadi keseluruhan pernyataan yang diberikan kepada responden ada 48 pernyataan sesuai dengan indikator variabel.

Hasil dari jawaban responden yang telah mengisi kuisisioner yang diberikan akan disajikan dalam bentuk table dan presentase data. Menurut Riduwan (2014:73), presentase data merupakan perhitungan yang digunakan untuk melihat perbandingan besar kecilnya jumlah jawaban yang

diberikan responden, karena frekuensi jawaban responden untuk setiap item tidak sama, yaitu dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase Jawaban

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

100% = Bilangan Mutlak

Kemudian responden yang menjawab diberikan skor atau nilai dengan tingkat jawaban, seperti yang telah dikemukakan pada alat pengukur data dalam bab 3, yaitu :

1. Jika Responden memilih jawaban (a) maka diberi skor nilai 5
2. Jika Responden memilih jawaban (b) maka diberi skor nilai 4
3. Jika Responden memilih jawaban (c) maka diberi skor nilai 3
4. Jika Responden memilih jawaban (d) maka diberi skor nilai 2
5. Jika Responden memilih jawaban (e) maka diberi skor nilai 1

Selanjutnya peneliti sajikan data-data mengenai kedua variabel tersebut dari masing-masing indikatornya.

a. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan suatu pola dasar yang dijadikan seseorang atau atau suatu kelompok sebagai pedoman untuk

meningkatkan tingkat kinerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam suatu instansi/organisasi.

Dalam hal ini prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai independen variabel yang mempengaruhi dependen variabel yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan. Independen variabel (prinsip-prinsip *Good Governance*) diberi lambang (X) dengan indikator sebagai berikut :

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Variabel (X) Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Participation</i> 2. <i>Rule Of Law</i> 3. <i>Transparency</i> 4. <i>Responsivness</i> 5. <i>Consensus Orientation</i> 6. <i>Equity</i> 7. <i>Effeciency and Effectiveness</i> 8. <i>Accountability</i> 9. <i>Strategic Vision</i> 	Mardiasmo (2018)

1. *Participation*

Untuk Indikator *participation* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan”. Peneliti memberikan

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.1 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	31	62
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan masyarakat di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu,

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.1 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	25	50
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.2 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	18	36
2	Setuju	4	26	52
3	Ragu-ragu	3	6	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan sangat diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan.

2. *Rule Of Law*

Untuk Indikator *rule of law* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana

masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.4 Hasil jawaban responden dengan pernyataan ”Pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	18	36
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar diantara pegawai dalam melaksanakan pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak

Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.3 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	21	42
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan masyarakat menilai semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.4 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	18	36
2	Setuju	4	26	52
3	Ragu-ragu	3	6	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Penegakan aturan di kantor kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi.

3. *Transparency*

Untuk Indikator *Transparency* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.5 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	33	66
3	Ragu-ragu	3	1	2
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.6 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	26	52
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.7 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat.

4. *Responsivness*

Untuk Indikator *Responsivness* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan public”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.8 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	23	46
3	Ragu-ragu	3	7	14
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.9 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	7	14
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat” Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, c. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.10 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	22	44
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

5. *Consensus Orientation*

Untuk Indikator *Consensus Orientation* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.11 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	22	44
2	Setuju	4	22	44
3	Ragu-ragu	3	6	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.12 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.13 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	19	38
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan.

6. *Equity*

Untuk Indikator *Equity* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ”Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.14 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	24	48
2	Setuju	4	21	42
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Pelayanan di kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.15 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	22	44
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan di kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Pemerintah Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan publik. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, c. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.16 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan publik”

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan publik.

7. *Efficiency and Effectivness*

Untuk Indikator *Effeciency and Effectivness* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.17 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan Masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	21	42
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.18 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	6	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.19 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	24	52
3	Ragu-ragu	3	7	14
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang memuaskan.

8. *Accountability*

Untuk Indikator *Accountability* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat“. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut:

Tabel 4.20 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	24	48
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	2	4
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4. 21 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	18	36
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.22 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	27	54
3	Ragu-ragu	3	7	14
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

9. *Strategic Vision*

Untuk Indikator *Strategic Vision* peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik” Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.23 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	21	42
2	Setuju	4	24	48
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.24 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari” Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, c. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.25 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “ Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel rangkuman total nilai jawaban responden untuk independen variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X), yaitu sebagai berikut :

Resp.	X1-1	X1-2	X1-3	X2-1	X2-2	X2-3	X3-1	X3-2	X3-3	X4-1	X4-2	X4-3	X5-1	X5-2	X5-3	X6-1	X6-2	X6-3	X7-1	X7-2	X7-3	X8-1	X8-2	X8-3	X9-1	X9-2	X9-3	TOTAL
29	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
30	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	128
31	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
32	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	87
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	124
36	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	112
37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105
38	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	80
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
41	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	129
42	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	3	3	4	5	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	108
43	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	5	120
44	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	104
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	3	5	5	5	4	4	4	104
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104
47	3	3	4	5	4	4	5	4	4	5	3	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	116
48	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	120
49	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	122
50	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	102
5570																												

Sumber : Hasil perhitungan jawaban responden

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan suatu tujuan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mengatur dan melayani masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar dan struktur yang mendasari tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam hal ini Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai dependen variabel diberi lambang (Y) dengan indikator sebagai berikut :

2	Variabel (Y) Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesederhanaan proses 2. Kejelasan prosedur 3. Kepastian waktu pelaksanaan 4. Kemudahan akses 5. Kedisiplinan 6. Kesopanan 7. Keramahan 	Edelman (2010:22)
---	---	---	--------------------------

Untuk mengetahui nilai penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti membuat tabel untuk penyajian data beserta keterangannya sebagai berikut :

1. Kesederhanaan proses

Untuk Indikator Kesederhanaan proses peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.29 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	27	54
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.27 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Tahapan pelayanan yang harus dilalui sudah disusun secara sederhana sehingga tidak membingungkan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.28 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Tahapan pelayanan yang harus dilalui sudah disusun secara sederhana sehingga tidak membingungkan.

2. Kejelasan prosedur

Untuk Indikator Kejelasan prosedur peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut:

Tabel 4.32 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.29 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	6	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.30 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	5	12
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas.

3. Kepastian waktu pelaksanaan

Untuk Indikator Kepastian waktu pelaksanaan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.35 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	20	40
2	Setuju	4	26	58
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan dengan jelas”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, c. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.31 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan dengan jelas”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	31	62
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan dengan jelas.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.32 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	36
2	Setuju	4	31	62
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

4. Kemudahan akses

Untuk Indikator Kemudahan akses peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut:

Tabel 4.38 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	21	42
2	Setuju	4	26	52
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.33 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.34 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

5. Kedisiplinan

Untuk Indikator Kedisiplinan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama "Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan". Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, c. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut:

Tabel 4.41 Hasil jawaban responden dengan pernyataan "Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan".

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	30	60
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.35 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	12	24
2	Setuju	4	33	66
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.36 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	14	28
2	Setuju	4	32	64
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

6. Kesopanan

Untuk Indikator Kesopanan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut

Tabel 4.44 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.37 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	19	38
2	Setuju	4	26	52
3	Ragu-ragu	3	5	10
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai masyarakat.

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.38 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	18	36
2	Setuju	4	28	56
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan.

7. Keramahan

Untuk Indikator Keramahan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut:

Tabel 4.47 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	16	32
2	Setuju	4	31	62
3	Ragu-ragu	3	3	6
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat.

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataan kedua “Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.39 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	15	30
2	Setuju	4	31	62
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataan ketiga “Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang bersahabat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut :

Tabel 4.40 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang bersahabat”.

No	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	17	34
2	Setuju	4	29	58
3	Ragu-ragu	3	4	8
4	Tidak Setuju	2	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	1	-	-
JUMLAH			50	100

Sumber : Hasil jawaban responden

Hal ini menunjukkan bahwa Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang bersahabat.

Kemudian selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel rangkuman total nilai jawaban responden untuk dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y), yaitu sebagai berikut :

29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
35	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	95
36	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	92
37	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	91
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	64
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
41	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	100
42	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	90
43	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	99
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
45	5	5	5	4	3	4	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	95
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
47	5	5	5	4	5	3	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
48	5	3	3	5	3	5	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	80
49	4	4	5	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	83
																					4461	

Sumber : Hasil perhitungan jawaban responden

E. Analisis Data

Untuk menemukan jawaban pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman (r_s) yang akan melewati langkah- langkah berikut :

1. Menentukan masing-masing ranking variabel X dan variabel Y

Jika terdapat nilai X atau Y yang sama (kembar), ranking yang diberikan adalah rata-rata dari posisi ranking yang seharusnya mereka tempati. Ini disebut peringkat rata-rata (*Tied Ranks*). Berikut rumus untuk penentuan ranking untuk nilai yang sama.

$$\text{Ranking rata - rata} = \frac{\text{Jumlah ranking ditempat nilai yang sama}}{\text{Jumlah nilai sama}}$$

Contoh: Tiga nilai sama pada posisi ke-2, ke-3, ke-4, ranking rata-rata = $(2+3+4)/3 = 3$.

2. Menentukan nilai d_i dengan mengurangkan nilai ranking X dan Y
3. Menentukan nilai d_i^2 dengan mengkuadratkan nilai d_i
4. Menentukan nilai $\sum d_i^2$ dengan menjumlahkan nilai dari d_i^2
5. Menentukan nilai $\sum x^2$ dan nilai $\sum y^2$ dengan menggunakan korelasi (T) untuk himpunan berangka sama.
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel X dan Y, peneliti menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman (r_s). Selanjutnya akan di

bandingkan dengan r_s tabel pada tingkat signifikan alfa 0,05 untuk jumlah responden (N) = 50, apabila r_s dihitung lebih besar atau sama dengan r_s tabel maka hipotesis H_a yang diterima, akan tetapi apabila terjadi sebaliknya, maka hipotesis tidak terima.

Sebagai langkah awal, berikut ini peneliti sajikan tabel perhitungan ranking untuk variabel prinsip-prinsip *Good Governance* (X) dan variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y) di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 4. 42 Urutan skor dan Ranking himpunan yang sama hberdasarkan nilai terkecil sampai nilai terbesar untuk Independen variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) dan Dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y).

Urutan Nilai Skor dan Ranking himpunan yang sama				
No. Resp	Jumlah Skor		Ranking	
	X	Y	X	Y
1	80	63	1	1,5
2	81	63	2	1,5
3	87	64	3	3
4	93	79	4	4
5	96	80	5	5
6	102	83	6,5	7
7	102	83	6,5	7
8	103	83	9	7
9	103	84	9	14,5
10	103	84	9	14,5
11	104	84	14,5	14,5
12	104	84	14,5	14,5
13	104	84	14,5	14,5
14	104	84	14,5	14,5
15	104	84	14,5	14,5
16	104	84	14,5	14,5
17	104	84	14,5	14,5
18	104	84	14,5	14,5

Urutan Nilai Skor dan Ranking himpunan yang sama				
No. Resp	Jumlah Skor		Ranking	
	X	Y	X	Y
19	105	84	19,5	14,5
20	105	84	19,5	14,5
21	106	85	21,5	21,5
22	106	85	21,5	21,5
23	107	86	23	23,5
24	108	86	24	23,5
25	109	87	25	25
26	110	88	26	26
27	111	89	27	28
28	112	89	28	28
29	113	89	29	28
30	114	90	30	30
31	115	91	31	31
32	116	92	32	32
33	118	94	33	33,5
34	120	94	35,5	33,5
35	120	95	35,5	36
36	120	95	35,5	36
37	120	95	35,5	36
38	121	96	38	38
39	122	97	39	39
40	124	99	40	41
41	126	99	41	41
42	127	99	42	41
43	128	100	44	43
44	128	105	44	47
45	128	105	44	47
46	129	105	46	47
47	130	105	48,5	47
48	130	105	48,5	47
49	130	105	48,5	47
50	130	105	48,5	47

Sumber data : pengelolaan data

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa himpunan skor yang berangka sama, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdapat 8 himpunan skor pada variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X) yang berangka sama, yaitu :
 1. Skor 102 dengan ranking 6,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 2. Skor 103 dengan ranking 9 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 3. Skor 104 dengan ranking 14,5 terdapat 8 himpunan yang berangka sama
 4. Skor 105 dengan ranking 19,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 5. Skor 106 dengan ranking 21,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 6. Skor 120 dengan ranking 35,5 terdapat 4 himpunan yang berangka sama
 7. Skor 128 dengan ranking 44 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 8. Skor 130 dengan ranking 48,5 terdapat 4 himpunan yang berangka sama

- b. Terdapat 10 himpunan skor variabel Penyelenggaraan Pemerintah (Y) yang berangka sama, yaitu :
1. Skor 63 dengan ranking 1,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 2. Skor 83 dengan ranking 7 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 3. Skor 84 dengan ranking 14,5 terdapat 12 himpunan yang berangka sama
 4. Skor 85 dengan ranking 21,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 5. Skor 86 dengan ranking 23,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 6. Skor 89 dengan ranking 28 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 7. Skor 94 dengan ranking 33,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama
 8. Skor 95 dengan ranking 36 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 9. Skor 99 dengan ranking 41 terdapat 3 himpunan yang berangka sama
 10. Skor 105 dengan ranking 47 terdapat 7 himpunan yang berangka sama

Tabel 4. 43 Skor dan Ranking hasil berdasarkan distribusi skor untuk Independen variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) dan Dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y).

No. Responden (N)	Jumlah Skor		Ranking		d_i	d_i^2
	X	Y	X	Y		
1	126	105	41	47	-6	36
2	105	84	19,5	14,5	5	25
3	109	89	25	28	-3	9
4	107	84	23	14,5	8,5	72,25
5	127	96	42	38	4	16
6	104	84	14,5	14,5	0	0
7	103	85	9	21,5	-12,5	156,25
8	104	84	14,5	14,5	0	0
9	128	94	44	33,5	10,5	110,25
10	128	105	44	47	-3	9
11	103	99	9	41	-32	1024
12	115	88	31	26	5	25
13	118	87	33	25	8	64
14	110	85	26	21,5	4,5	20,25
15	102	79	6,5	4	2,5	6,25
16	104	84	14,5	14,5	0	0
17	96	84	5	14,5	-9,5	90,25
18	130	105	48,5	47	1,5	2,25
19	130	105	48,5	47	1,5	2,25
20	130	105	48,5	47	1,5	2,25
21	93	86	4	23,5	-19,5	380,25
22	120	97	35,5	39	-3,5	12,25
23	104	84	14,5	14,5	0	0
24	113	95	29	36	-7	49
25	111	94	27	33,5	-6,5	42,25
26	121	89	38	28	10	100
27	114	89	30	28	2	4
28	81	63	2	1,5	0,5	0,25
29	106	84	21,5	14,5	7	49
30	128	105	44	47	-3	9
31	106	83	21,5	7	14,5	210,25
32	87	63	3	1,5	1,5	2,25

No. Responpen (N)	Jumlah Skor		Ranking		d_i	d_i^2
	X	Y	X	Y		
33	130	105	48,5	47	1,5	2,25
34	120	84	35,5	14,5	21	441
35	124	95	40	36	4	16
36	112	92	28	32	-4	16
37	105	91	19,5	31	-11,5	132,25
38	80	64	1	3	-2	4
39	104	84	14,5	14,5	0	0
40	103	84	9	14,5	-5,5	30,25
41	129	100	46	43	3	9
42	108	90	24	30	-6	36
43	120	99	35,5	41	-5,5	30,25
44	104	83	14,5	7	7,5	56,25
45	104	95	14,5	36	-21,5	462,25
46	104	84	14,5	14,5	0	0
47	116	99	32	41	-9	81
48	120	80	35,5	5	30,5	930,25
49	122	86	39	23,5	15,5	240,25
50	102	83	6,5	7	-0,5	0,25
Jumlah	5570	4461			0	5016

Sumber data : pengelolaan data

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa $\sum d_i^2 = 5016$

Selanjutnya peneliti akan mencari nilai $\sum x^2$ dan nilai $\sum y^2$, dimana masing-masing jumlah nilai tersebut akan ditentukan dari jumlah faktor Korelasi (T) pada setiap variabel dengan rumus sebagai berikut :

a. Independen variabel atau variabel (X) yang terdapat himpunan yang berangka sama yaitu :

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Tx$$

$$\sum x^2 = \frac{50^3 - 50}{12} - \left(\frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} \right)$$

$$\sum x^2 = \frac{125.000 - 50}{12} - \left(\frac{8-2}{12} + \frac{27-3}{12} + \frac{512-8}{12} + \frac{8-2}{12} \right)$$

$$\sum x^2 = \frac{124.950}{12} - \left(\frac{6}{12} + \frac{24}{12} + \frac{504}{12} + \frac{6}{12} \right)$$

$$\sum x^2 = 10.412,5 - (0,5 + 2 + 42 + 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 5)$$

$$\sum x^2 = 10.412,5 - 57,5$$

$$\sum x^2 = 10.335$$

- b. Dependensi variabel atau variabel (Y) yang terdapat himpunan yang berangka sama yaitu :

$$\Sigma y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \Sigma T_y$$

$$\Sigma y^2 = \frac{50^3 - 50}{12} = \left(\frac{2^3-2}{12} + \frac{3^3-3}{12} + \frac{12^3-12}{12} + \frac{2^3-2}{12} + \frac{2^3-2}{12} \right. \\ \left. \frac{3^3-3}{12} + \frac{2^3-2}{12} + \frac{3^3-3}{12} + \frac{3^3-3}{12} + \frac{7^3-7}{12} \right)$$

$$\Sigma y^2 = \frac{125.000 - 50}{12} = \left(\frac{8-2}{12} + \frac{27-3}{12} + \frac{1728-12}{12} + \frac{8-2}{12} + \frac{8-2}{12} \right) \\ \left(\frac{27-3}{12} + \frac{8-2}{12} + \frac{27-3}{12} + \frac{27-3}{12} + \frac{343-7}{12} \right)$$

$$\Sigma y^2 = \frac{124.950}{12} = \left(\frac{6}{12} + \frac{24}{12} + \frac{1716}{12} + \frac{6}{12} + \frac{6}{12} \right) \\ \left(\frac{24}{12} + \frac{6}{12} + \frac{24}{12} + \frac{24}{12} + \frac{336}{12} \right)$$

$$\Sigma y^2 = 10.412,5 = (0,5 + 2 + 143 + 0,5 + 0,5 + 2 + 0,5 + 2 + 2 + 28)$$

$$\Sigma y^2 = 10.412,5 - 181$$

$$\Sigma y^2 = 10.231,5$$

Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan diatas, maka korelasinya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum x^2 = 10.335$$

$$\sum y^2 = 10.231,5$$

$$\sum d_i^2 = 5016$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

$$r_s = \frac{(10.335) + (10.231,5) - 5016}{2\sqrt{10.335 \cdot 10.231,5}}$$

$$r_s = \frac{20.566,5 - 5016}{2\sqrt{105.742.552}}$$

$$r_s = \frac{15.550,5}{2.105.742.552}$$

$$r_s = \frac{15.550,5}{211.485,104}$$

$$r_s = 0,0735300014 = 0,735$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diketahui jumlah yang sama pada $\sum x^2 = 10.335$ kemudian jumlah yang sama pada variabel $\sum y^2 = 10.231,5$ dan jumlah keseluruhan $\sum d_i^2$ yang merupakan harga masing-masing objek yang diperoleh dari selisih antara ranking X dan Y melalui pengkuadratan atau $\sum d_i^2 = 5016$ maka

diperoleh tingkat korelasi (r_s) perhitungan dengan $N = 50$ dan r_s tabel kritis pada tingkat signifikan alfa $\alpha 0,05$ adalah $0,235$. Maka jika dibandingkan maka r_s perhitungan lebih besar daripada r_s tabel kritis ($0,735 > 0,235$). Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan peneliti diterima yaitu hipotesis H_a , adanya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah populasi sebanyak 50 responden, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas dan bervisi strategis memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.
2. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilaksanakan oleh pegawai di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat sudah cukup baik dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat hal ini sejalan dengan temuan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka kinerja organisasi pemerintahan juga semakin meningkat.
3. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance*

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan r_s (0,735) lebih besar daripada r_s tabel harga kritis dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 (0,235).

4. Dengan demikian maka hipotesis yang telah diterima adalah Hipotesis Alternatif (H_a) bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan menolak Hipotesis Null (H_o) yang dimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat adanya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat diharapkan penerapan

prinsip-prinsip *good governance* perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dengan menjalankan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau yang telah disepakati.

2. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi agar penerapan prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan harapan masyarakat dan standar pemerintahan yang baik.
3. Berdasarkan data penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat sejumlah responden yang memilih opsi skala 3 atau ragu-ragu dalam kuesioner. Pilihan ini menunjukkan adanya ketidakpastian atau ketidaktegasan responden dalam memberikan jawaban yang pasti. Oleh karena itu, disarankan beberapa perbaikan untuk mengurangi ketergantungan yaitu dengan melakukan perbaikan desain instrumen, penyesuaian skala likert dengan menggunakan skala dalam jumlah ganjil dengan opsi netral namun dengan penjelasan dan makna yang jelas atau tanpa menggunakan opsi netral agar responden terdorong memilih sikap yang jelas, dan pemberian instruksi yang jelas kepada responden

yang menekankan pentingnya memilih jawaban yang paling mencerminkan pendapat sebenarnya, bukan jawaban aman atau netral karena ketidakpastian.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat melakukan pembinaan atau pelatihan seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi, dan peningkatan pengawasan dan evaluasi internal. Dengan melakukan peningkatan di berbagai aspek tersebut, diharapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kecamatan Jempang dapat menjadi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AGUS DWIYANTO, 2021, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Penerbit Gadjah Mada University Press, IKAPI, APPTI.
- ASTUTI, R. SUNU., WARSONO, HARDI., & RACHIM, ABD. (2020). *Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.
- DEDY MULYADI, 2015, Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- EDELMAN, W. 2010. Memahami *Good Government* dan *Good Corporate*. Yogyakarta: YPAPI
- H. M. HARRY MULYA ZEIN, SISCA SEPTIANI, 2024, Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi *Good Governance*, Banten: IKAPI
- H. SISWANTO SUNARNO, 2023, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- HETIFAH SUMARTO, 2003, Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, edisi I Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- ISMAIL NURDIN, 2017, Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara
- JUNAEDI KARSO, 2022, Buku Ajar *Good Governance*, Penerbit Samudera Biru, Yogyakarta: IKAPI.
- LEXY J. MOLEONG, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MARDI CANDRA, 2024, Birokrasi dan *Good Governance*, Penerbit Kencana, Jakarta.

RACHMAT TRIJONO, 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Paps Sinar Sinanti.

RAHYUNIR RAUF, 2018, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya), Penerbit Nusa Media Yogyakarta.

SUGIYONO, 2004, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Penerbit ALFABETA, Bandung.

_____, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung: Alfabeta

DOKUMEN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Kep-/M-MBU/2002 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance.

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat.

JURNAL

ANDI NIMAH SULFIANI. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.

ASHABUL MAIMANAH, & NURDIONO NURDIONO. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 178–202.

LIONANDIVA, G., & TRIANDI, T. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 607–616.

MAHSUN ET AL. (2018). Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 149-160.

MARDIASMO, T. (2018). *Good Governance: Konsep, Indikator, dan Implementasi*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 78-92.

RACHMAN, A. (2018). Fungsi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 123-135.

RAHAYUNINGTYAS, S., & SETYANINGRUM, D. (2018). Evaluating the implementation of *Good Governance* in Indonesian provincial governments: An empirical study on accountability and transparency indices. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 71-88.

S., GAMPONG, D., (2023) Kecamatan, S., Kota, B., & Aceh, B. (n.d.). *TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI TINGKAT GAMPONG*.

- SAFITRI, A. M. (n.d.). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN BUDURAN Wahidahwati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.*
- SEDARMAYANTI, M. (2014). *Good Governance: Teori dan Praktik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 5-20.
- SUHARTO, A. (2017). "Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia". Bandung: Penerbit Alfabeta.
- SULTAN, N., & RIAU, S. K. (n.d.). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU SKRIPSI.*
- TAHIR, (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*
- YALTI, A. (2020). Penerapan *Good Governance* pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 123-135.
- YUSNANDAR, A. (2024). Pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN Pandeglang. *Jurnal PKN*, 8(3).

LAMPIRAN 1

Lampiran 1.1 Panduan Wawancara (Kuisisioner)

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama :

Usia :

Jabatan :

(Berikut adalah 3 pernyataan kuisisioner untuk masing-masing indikator yang ditujukan kepada responden pegawai kerja dan masyarakat dalam penelitian skripsi tentang "Pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kutai Barat". Pilihan jawaban menggunakan skala *Likert* 5 poin: Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

***Participation* (Partisipasi)**

1. Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan.
2. Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka.
3. Saya merasa aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan.

***Rule of Law* (Aturan Hukum)**

1. Pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil.

3. Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Transparency (Transparansi)

1. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat.
3. Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat.

Responsivness (Responsivitas)

1. Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.
2. Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
3. Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Consensus Orientation (Orientasi Konsensus)

1. Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
2. Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik.
3. Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan.

Equity (Keadilan)

1. Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor kecamatan.
2. Pelayanan di kantor kecamatan diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial.

3. Pemerintah kecamatan memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan publik.

Efficiency and Effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas)

1. Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik.

Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan.

Accountability (Akuntabilitas)

1. Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat.
3. Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Strategic Vision (Visi Strategis)

1. Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.
3. Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Indikator Kesederhanaan Proses

1. Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.
2. Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

3. Tahapan pelayanan yang harus dilalui sudah disusun secara sederhana sehingga tidak membingungkan.

Indikator Kejelasan Prosedur

1. Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur pelayanan yang harus dijalani.
2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas.

Indikator Kepastian Waktu Pelaksanaan

1. Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh petugas.
3. Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

Indikator Kemudahan Akses

1. Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah.
2. Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung.
3. Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

Indikator Kedisiplinan

1. Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
2. Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

Indikator Kesopanan

1. Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung.
2. Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai masyarakat.
3. Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan.

Indikator Keramahan

1. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat.
2. Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik.
3. Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang bersahabat.

LAMPIRAN 2

Lampiran 2.1 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Kecamatan Jempang

Sumber : Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, 2025.

**Lampiran 2.2 Dokumentasi wawancara dengan Camat Kecamatan Jempang
Bapak Lorensius Itang, SE**



Sumber : Peneliti 5 Mei 2025

Lampiran 2.3 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sekretaris Kecamatan Jempang Ibu Rita, S.Sos



Sumber : Peneliti 5 Mei 2025

LAMPIRAN 3

Lampiran 3.1 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN JEMPANG
Jalan Tanjung Isuy-Muara Nayan RT.X No.01
TANJUNG ISUY

Kode Pos 75773

Tanjung Isuy, 02 Juni 2024

Nomor : B.57/2003/432.6/203/Umum
Lampiran : -
Perihal : Menindaklanjuti Surat Penelitian &
Permintaan Data Skripsi

Kepada
Yth.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi
Universitas Widya Gama Mahakam
Di –
Samarinda.

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor :
146/WGM/AK/IV/2025 Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data Akhir/Skripsi
Pada Program Studi S1 Administrasi Publik. Maka dengan ini kami dari Pemerintah Kecamatan
Jempang Menerima Mahasiswa dalam memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan
dalam penulisan karya ilmiah atau penyusunan penulisan skripsi di Kecamatan Jempang Sebagai
Berikut :

Nama	Npm	Judul
Felisianus Rivaldo	2163201047	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat



LORENSIUS IFANG, SE., M.Si
NIP. 19750103 200701 1 013

LAMPIRAN 4

Lampiran 4.1 Tabel Harga Kritis Korelasi Rank Spearman

Critical Values of the Spearman's Ranked Correlation Coefficient (r_s)
 Taken from Zar, 1984 Table B.19

$\alpha(2):$	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	$\alpha(2):$	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
$\alpha(1):$	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005	$\alpha(1):$	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
n										n									
4	0.600	1.000	1.000							51	0.096	0.182	0.233	0.276	0.326	0.359	0.390	0.426	0.451
5	0.500	0.800	0.900	1.000	1.000					52	0.095	0.180	0.231	0.274	0.323	0.356	0.386	0.422	0.447
6	0.371	0.657	0.829	0.886	0.943	1.000	1.000			53	0.095	0.179	0.228	0.271	0.320	0.352	0.382	0.418	0.443
7	0.321	0.571	0.714	0.786	0.893	0.929	0.964	1.000	1.000	54	0.094	0.177	0.225	0.268	0.317	0.349	0.379	0.414	0.439
8	0.310	0.524	0.643	0.738	0.833	0.881	0.905	0.952	0.976	55	0.093	0.175	0.224	0.266	0.314	0.346	0.375	0.411	0.435
9	0.267	0.483	0.600	0.700	0.783	0.833	0.867	0.917	0.933	56	0.092	0.174	0.222	0.264	0.311	0.343	0.372	0.407	0.432
10	0.248	0.455	0.584	0.648	0.745	0.794	0.830	0.879	0.903	57	0.091	0.172	0.220	0.261	0.308	0.340	0.369	0.404	0.428
11	0.236	0.427	0.536	0.618	0.709	0.755	0.800	0.845	0.873	58	0.090	0.171	0.218	0.259	0.306	0.337	0.366	0.400	0.424
12	0.217	0.406	0.503	0.587	0.678	0.727	0.769	0.818	0.846	59	0.089	0.169	0.216	0.257	0.303	0.334	0.363	0.397	0.421
13	0.209	0.385	0.484	0.560	0.648	0.703	0.747	0.791	0.824	60	0.089	0.168	0.214	0.255	0.300	0.331	0.360	0.394	0.418
14	0.200	0.367	0.464	0.538	0.626	0.679	0.723	0.771	0.802	61	0.088	0.166	0.213	0.252	0.298	0.329	0.357	0.391	0.414
15	0.189	0.354	0.446	0.521	0.604	0.654	0.700	0.750	0.779	62	0.087	0.165	0.211	0.250	0.296	0.326	0.354	0.388	0.411
16	0.182	0.341	0.429	0.503	0.582	0.635	0.679	0.729	0.762	63	0.086	0.163	0.209	0.248	0.293	0.323	0.351	0.385	0.408
17	0.176	0.328	0.414	0.485	0.566	0.615	0.662	0.713	0.748	64	0.086	0.162	0.207	0.246	0.291	0.321	0.348	0.382	0.405
18	0.170	0.317	0.401	0.472	0.550	0.600	0.643	0.695	0.728	65	0.085	0.161	0.206	0.244	0.289	0.318	0.346	0.379	0.402
19	0.165	0.309	0.391	0.460	0.535	0.584	0.628	0.677	0.712	66	0.084	0.160	0.204	0.243	0.287	0.316	0.343	0.376	0.399
20	0.161	0.299	0.380	0.447	0.520	0.570	0.612	0.662	0.696	67	0.084	0.158	0.203	0.241	0.284	0.314	0.341	0.373	0.396
21	0.156	0.292	0.370	0.435	0.508	0.556	0.599	0.648	0.681	68	0.083	0.157	0.201	0.239	0.282	0.311	0.338	0.370	0.393
22	0.152	0.284	0.361	0.425	0.496	0.544	0.586	0.634	0.667	69	0.082	0.156	0.200	0.237	0.280	0.309	0.336	0.368	0.390
23	0.148	0.278	0.353	0.415	0.486	0.532	0.573	0.622	0.654	70	0.082	0.155	0.198	0.235	0.278	0.307	0.333	0.365	0.388
24	0.144	0.271	0.344	0.406	0.476	0.521	0.562	0.610	0.642	71	0.081	0.154	0.197	0.234	0.276	0.305	0.331	0.363	0.385
25	0.142	0.265	0.337	0.398	0.466	0.511	0.551	0.598	0.630	72	0.081	0.153	0.195	0.232	0.274	0.303	0.329	0.360	0.382
26	0.138	0.259	0.331	0.390	0.457	0.501	0.541	0.587	0.619	73	0.080	0.152	0.194	0.230	0.272	0.301	0.327	0.358	0.380
27	0.136	0.255	0.324	0.382	0.448	0.491	0.531	0.577	0.608	74	0.080	0.151	0.193	0.229	0.271	0.299	0.324	0.355	0.377
28	0.133	0.250	0.317	0.375	0.440	0.483	0.522	0.567	0.598	75	0.079	0.150	0.191	0.227	0.269	0.297	0.322	0.353	0.375
29	0.130	0.245	0.312	0.368	0.433	0.475	0.513	0.558	0.589	76	0.078	0.149	0.190	0.226	0.267	0.295	0.320	0.351	0.372
30	0.128	0.240	0.306	0.362	0.425	0.467	0.504	0.549	0.580	77	0.078	0.148	0.189	0.224	0.265	0.293	0.318	0.349	0.370
31	0.126	0.236	0.301	0.356	0.418	0.459	0.496	0.541	0.571	78	0.077	0.147	0.188	0.223	0.264	0.291	0.316	0.346	0.368
32	0.124	0.232	0.296	0.350	0.412	0.452	0.489	0.533	0.563	79	0.077	0.146	0.186	0.221	0.262	0.289	0.314	0.344	0.365
33	0.121	0.229	0.291	0.345	0.405	0.446	0.482	0.525	0.554	80	0.076	0.145	0.185	0.220	0.260	0.287	0.312	0.342	0.363
34	0.120	0.225	0.287	0.340	0.399	0.439	0.475	0.517	0.547	81	0.076	0.144	0.184	0.219	0.259	0.285	0.310	0.340	0.361
35	0.118	0.222	0.283	0.335	0.394	0.433	0.468	0.510	0.539	82	0.075	0.143	0.183	0.217	0.257	0.284	0.308	0.338	0.359
36	0.116	0.219	0.279	0.330	0.388	0.427	0.462	0.504	0.533	83	0.074	0.142	0.182	0.216	0.255	0.282	0.306	0.336	0.357
37	0.114	0.216	0.275	0.325	0.383	0.421	0.456	0.497	0.526	84	0.074	0.141	0.181	0.215	0.254	0.280	0.305	0.334	0.355
38	0.113	0.212	0.271	0.321	0.378	0.415	0.450	0.491	0.519	85	0.074	0.140	0.180	0.213	0.252	0.279	0.303	0.332	0.353
39	0.111	0.210	0.267	0.317	0.373	0.410	0.444	0.485	0.513	86	0.074	0.139	0.179	0.212	0.251	0.277	0.301	0.330	0.351
40	0.110	0.207	0.264	0.313	0.368	0.405	0.439	0.479	0.507	87	0.073	0.139	0.177	0.211	0.250	0.276	0.299	0.328	0.349
41	0.108	0.204	0.261	0.309	0.364	0.400	0.433	0.473	0.501	88	0.073	0.138	0.176	0.210	0.248	0.274	0.298	0.327	0.347
42	0.107	0.202	0.257	0.305	0.359	0.395	0.428	0.468	0.495	89	0.072	0.137	0.175	0.209	0.247	0.272	0.296	0.325	0.345
43	0.105	0.199	0.254	0.301	0.355	0.391	0.423	0.463	0.490	90	0.072	0.136	0.174	0.207	0.245	0.271	0.294	0.323	0.343
44	0.104	0.197	0.251	0.298	0.351	0.386	0.419	0.458	0.484	91	0.072	0.135	0.173	0.206	0.244	0.269	0.293	0.321	0.341
45	0.103	0.194	0.248	0.294	0.347	0.382	0.414	0.453	0.479	92	0.071	0.135	0.173	0.205	0.243	0.268	0.291	0.319	0.339
46	0.102	0.192	0.246	0.291	0.343	0.378	0.410	0.448	0.474	93	0.071	0.134	0.172	0.204	0.241	0.267	0.290	0.318	0.338
47	0.101	0.190	0.243	0.288	0.340	0.374	0.405	0.443	0.469	94	0.070	0.133	0.171	0.203	0.240	0.265	0.288	0.316	0.336
48	0.100	0.188	0.240	0.285	0.336	0.370	0.401	0.439	0.465	95	0.070	0.133	0.170	0.202	0.239	0.264	0.287	0.314	0.334
49	0.098	0.186	0.238	0.282	0.333	0.366	0.397	0.434	0.460	96	0.070	0.132	0.169	0.201	0.238	0.262	0.285	0.313	0.332
50	0.097	0.184	0.235	0.279	0.329	0.363	0.393	0.430	0.456	97	0.069	0.131	0.168	0.200	0.236	0.261	0.284	0.311	0.331
										98	0.069	0.130	0.167	0.199	0.235	0.260	0.282	0.310	0.329
										99	0.068	0.130	0.166	0.198	0.234	0.259	0.281	0.309	0.328
										100	0.068	0.129	0.165	0.197	0.233	0.258	0.280	0.308	0.327